

**TINJAUAN JARINGAN DAN FUNGSI JALAN PRIMER
BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 - 2032**

***REVIEW OF PRIMARY ROAD NETWORK AND FUNCTION ON
THE REGIONAL SPATIAL PLAN BALIKPAPAN AT 2012 - 2032***

Reza Fachrizal

Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda
Fachrizal.reza@gmail.com

Ibayasid

Staff Pengajar, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda
sid_bintoro@yahoo.com

M. Salmani

Staff Pengajar, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda
salmaniical@gmail.com

INTISARI

Perkembangan kota yang cukup pesat setiap tahunnya, menyebabkan angka pertumbuhan volume kendaraan yang melintas juga ikut meningkat. Hal ini tentu berdampak pada infrastruktur berupa jalan. Berdasarkan kondisi ini, sistem jaringan dan fungsi jalan primer di Kota Balikpapan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032 perlu ditinjau ulang, apakah kondisinya masih sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 ruas jalan direkomendasikan untuk ditambahkan sebagai jalan arteri dan kolektor primer. 3 ruas jalan berubah fungsinya dari arteri sekunder menjadi arteri primer. Hanya 11 % atau sebanyak 3 segmen jalan dari 28 segmen jalan arteri yang memenuhi persyaratan jalan masuk dibatasi dan untuk jalan kolektor tidak yang memenuhi persyaratan ini.

Kata kunci: Jaringan jalan, jalan primer, rencana tata ruang wilayah

ABSTRACT

Development of the city quite rapidly every year, causing in volume growth rate of passing vehicles also increased. This is certainly an impact on the infrastructure of roads. Based on this condition, the network system and the function of the primary roads in the city of Balikpapan which has been set by the Urban Land Use Plan (RTRW) Balikpapan Year 2012 - 2032 should be reviewed, whether the condition is still in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2004 and Government Regulation Republic of Indonesia Number 34 Year 2006 on Roads and Public Works Minister Regulation No. 03 / PRT / M / 2012 Year 2012 on Guidelines for Determination Function and Status of the road.

The results showed that the 2 roads is recommended to be added as a primary arterial roads and collector. 3 road changed it's function of secondary arterial become a primary

artery. Only 11% or as much as 3 segments of 28 segments of the arterial road that meets the requirements of the driveway is restricted and for collector roads that do not meet these requirements.

Keyword: Road network, road primer, regional spatial plan

PENDAHULUAN

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang sangat penting untuk menghubungkan berbagai macam wilayah satu dengan wilayah lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menjelaskan bahwa sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki dan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah 503,3 km², kota ini merupakan daerah yang strategis dengan adanya dukungan sarana transportasi udara dan laut yang berskala internasional menjadikan kota ini sebagai gerbang masuk penduduk maupun kendaraan ke berbagai kota lain yang ada disekitarnya seperti Penajam, Tenggarong, dan Samarinda. Adanya industri yang bergerak disektor perminyakan dan gas serta perdagangan, menjadikan kota Balikpapan sebagai jalur pendistribusian barang dan Jasa. Hal Ini berdampak pada laju pertumbuhan penduduk serta kegiatan perekonomian. Jumlah penduduk dari data m(Balikpapan Dalam Angka 2013) pada tahun 2012 sebanyak 604.449 jiwa, mengalami peningkatan sampai bulan Januari 2015 mencapai 706.414 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan. Meningkatnya jumlah penduduk disetiap tahunnya, tidak diimbangi dengan infrastruktur yang ada yakni jalan yang memadai.

Berdasarkan dari data (Balikpapan Dalam Angka 2013), bahwa pada tahun 2012 panjang ruas jalan di Kota Balikpapan

adalah 758,811 km dengan rincian 112,95 km adalah jalan nasional, 305,49 km adalah jalan provinsi serta 340,371 km adalah jalan kota. Dengan adanya perkembangan kota yang cukup pesat disetiap tahunnya, mengakibatkan bertambahnya volume kendaraan yang melintas. Hal ini berdampak pada tingkat kemacetan dan juga infrastruktur khususnya jalan yang ada di Kota Balikpapan. Melihat kondisi ini, penanganan sistem jaringan jalan di Kota Balikpapan perlu diperhatikan agar kondisinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta Peraturan Menteri PU Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan. Sistem jaringan jalan Kota Balikpapan tertera di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012. Hasil dari penelitian ini dapat di rekomendasikan kepada instansi terkait dan dalam penerapannya, penggunaan jaringan jalan sesuai dengan fungsinya sehingga diharapkan terciptanya sistem transportasi yang efisien serta memajukan kegiatan perekonomian daerah.

LANDASAN TEORI

Umum

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan peruntukannya dikategorikan menjadi jalan umum dan jalan khusus. Adapun dasar penyelenggaraan dari masing-masing jalan ini diatur dalam Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pedoman Penyelenggaraan Jalan Umum

Dasar penyelenggaraan jalan umum diatur dalam Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dapat diklasifikasikan menurut sistem jaringan jalan, fungsi, status, dan kelas jalan, serta Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penetapan fungsi dan status jalan.

Klasifikasi Jalan Umum Menurut Sistem Jaringan Jalan (UU No.38 Tahun 2004 pasal 7 dan PP No.34 Tahun 2006 pasal 6) yaitu:

1. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL) sampai ke pusat kegiatan lingkungan (PKLing), dan
2. menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Klasifikasi Jalan Umum Menurut Fungsi Jalan (UU No.38 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1)) yaitu:

1. Jalan Arteri berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibuat seefisien mungkin,
2. Jalan Kolektor berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi,
3. Jalan Lokal berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat kecepatan rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan Lingkungan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan cirri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Klasifikasi Jalan Umum Menurut Status Jalan (PP No. 34 Tahun 2006 dan Permen PU No. 03/PRT/M/2012) yaitu:

1. jalan nasional, merupakan jalan arteri primer, kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
2. jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota,

3. jalan Kabupaten/Kota, merupakan jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan,
4. jalan Desa, merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten/kota.

Klasifikasi Jalan Umum Menurut Kelas Jalan yaitu:

1. menurut Muatan Sumbu Terberat (MST) yang ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi menurut Muatan Sumbu Terberat (MST)

Fungsi	Kelas	Dimensi Kendaraan Maksimum		Muatan Sumbu Terberat (MST) (Ton)
		Panjang (m)	Lebar (m)	
Arteri	I	≤ 18	≥ 2.5	> 10
	II	≤ 18	≥ 2.5	10
	III A	≤ 18	≥ 2.5	8
Kolektor	III A	≤ 18	≥ 2.5	8
	III B	≤ 12	≥ 2.5	8
Lokal	III C	≤ 9	≥ 2.1	8

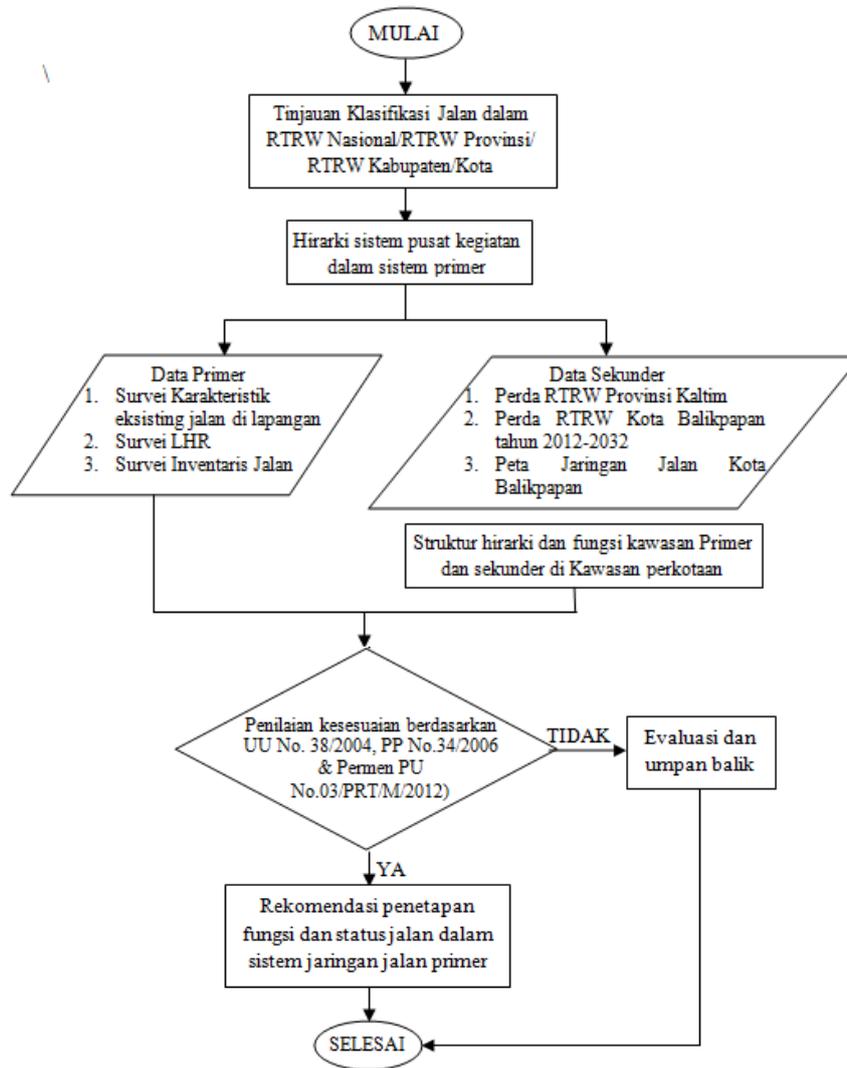
2. menurut Spesifikasi Penyedia Prasarana Jalan yang ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan

KELAS JALAN (Berdasarkan Penyediaan Prasarana Jalan)	Spesifikasi Jalan						
	Diperuntukkan bagi lalu lintas	Pengendalian Akses (Jalan Masuk)	Persimpangan Sebidang	Jumlah Lajur Minimum	Lebar Lajur atau Jalur Minimum	Median	Pagar
JALAN BEBAS HAMBATAN	Umum menerus, jarak jauh	Terkontrol Penuh	Tidak Ada	2 lajur per arah	3,50 m per lajur	Median	Pagar Rumija
JALAN RAYA	jarak jauh	Terbatas	Ada	2 lajur per arah	3,50 m per lajur	Median	-
JALAN SEDANG	Umum, jarak sedang	-	Ada	2 lajur untuk 2 arah	Jalur Min 7,00 m	-	-
JALAN KECIL	Umum, setempat	-	Ada	2 lajur untuk 2 arah	Jalur Min 5,50 m	-	-

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian akan dilakukan diberbagai ruas jalan di Kota Balikpapan dengan objek penelitian yakni sistem jaringan jalan yang tercantum pada RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012. Langkah pelaksanaan penelitian ditunjukkan oleh Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tinjauan dan Evaluasi Terhadap Sistem Jaringan Jalan

Hasil tinjauan dan evaluasi sebelum dan sesudah dilakukan tinjauan terhadap sistem jaringan jalan ditampilkan dalam Tabel 3.

Hasil Tinjauan Terhadap Fungsi Jalan

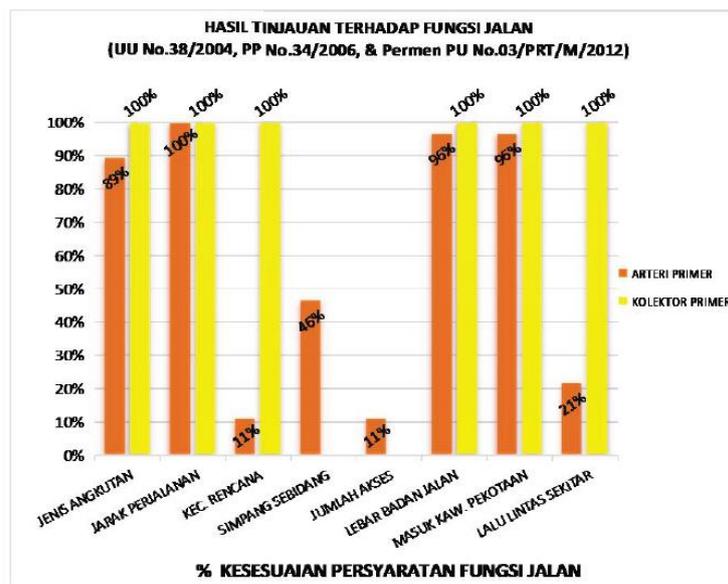
Hasil tinjauan terhadap fungsi jalan ditampilkan dalam Tabel 4 dan dalam grafik pada Gambar 2.

Tabel 3. Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan tinjauan terhadap sistem jaringan jalan

Kondisi Awal		Kondisi Setelah Dilakukan Tinjauan	
Jaringan Jalan Primer		Jaringan Jalan Primer	
No.	Nama Ruas Jalan	No.	Nama Ruas Jalan
1	Soekarno - Hatta	1	Soekarno - Hatta
2	AMD. Projakal	2	AMD. Projakal
3	Sutan Hasanudin	3	Sutan Hasanudin
4	Mulawarman	4	Mulawarman
5	Yos Soedarso	5	Yos Soedarso
6	Marsma. R. Iswahyudi	6	Marsma. R. Iswahyudi
7	Jendral Sudirman	7	Jendral Sudirman
Jaringan Jalan Sekunder		8	Ahmad Yani
1	Ahmad Yani	9	MT. Haryono
2	MT. Haryono	10	Syarifudin Yoes
3	Syarifudin Yoes	11	Tol/Freeway (Km. 13 BPN - TPK Kariangan)
	-		
1	Tol/Freeway (Km. 13 BPN - TPK Kariangan)	12	MT. Haryono Dalam
2	MT. Haryono Dalam		

Tabel 4. Hasil tinjauan terhadap fungsi jalan

No.	Nama Jalan		Rekomendasi
	Ruas	Segmen	
1	Soekamo - Hatta	1	Mengatur akses keluar masuk jalan Soekamo-Hatta dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
		2	
		3	
2	AMD. Projakal		Mengatur akses keluar masuk jalan dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
3	Sultan Hasanudin		Mengatur akses keluar masuk jalan dan simpang sebidang agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
4	Mulawarman	1	Mengatur akses keluar masuk jalan, simpang sebidang, dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
		2	
		3	
		4	
5	Marsma R. Iswahyudi		Mengatur akses keluar masuk jalan dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
6	Yos Soedanso		Mengatur akses keluar masuk jalan dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
7	Jendral Sudirman	1	Mengatur akses keluar masuk jalan, simpang sebidang, dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
8	Ahmad Yani		Mengatur akses keluar masuk jalan dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
9	Syarifudin Yoes	1	Mengatur akses keluar masuk jalan dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
		2	
10	MT. Haryono	1	Mengatur akses keluar masuk jalan, simpang sebidang, dan LL ulang alik agar kecepatan kendaraan yang melintas dapat terpenuhi.
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
11	Tol/Freeway (Km. 13 BPN - TPK Kariangan)		Menyelesaikan pembangunan ruas jalan SMD-BPN dan Km. 13 BPN-Manggar
12	MT. Haryono Dalam		Mengatur akses keluar masuk jalan dan Simpan sebidang.



Gambar 2. Grafik hasil tinjauan dan evaluasi terhadap fungsi jalan

Hasil Tinjauan Terhadap Status Jalan

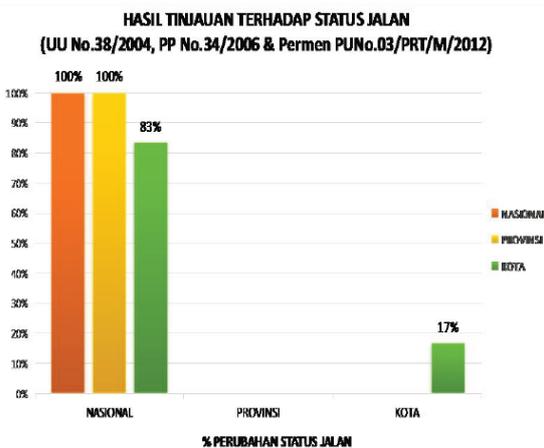
Hasil tinjauan terhadap status jalan ditampilkan dalam Tabel 5 dan dalam grafik pada Gambar 3.

Tabel 5. Hasil tinjauan terhadap status jalan

No.	Nama Jalan		Koondisi Awal	Rekomendasi
	Ruas	Segmen		
1	Soekarno - Hatta	1	N	Sudah sesuai
		2	N	
		3	N	
2	AMD. Projakal		P	Diubah menjadi jalan Nasional
3	Sultan Hasanudin		P	Diubah menjadi jalan Nasional
4	Mulawarman	1	P	Diubah menjadi jalan Nasional
		2	P	
		3	P	
		4	P	
5	Marsma. R. Iswahyudi	1	N	Sudah sesuai
		2	P	Diubah menjadi jalan Nasional
6	Yos Soedarso		N	Sudah sesuai
7	Jendral Sudirman	1	N	Sudah sesuai
		2	N	
		3	N	
		4	N	
		5	N	
		6	N	
8	Ahmad Yani		K	Diubah menjadi jalan Nasional
9	Syarifudin Yoes	1	N	Sudah sesuai
		2	N	
10	MT. Haryono	1	N	Sudah sesuai
		2	N	
		3	K	
		4	K	Diubah menjadi jalan Nasional
		5	K	
		6	K	
11	Tol/Freeway (Km 13 BPN - TPK. Kariangau)		P	Diubah menjadi jalan Nasional
12	MT. Haryono Dalam		K	Sudah sesuai

Keterangan :

P = Provinsi K = Kota N = Nasional



Gambar 3. Grafik hasil tinjauan terhadap status jalan

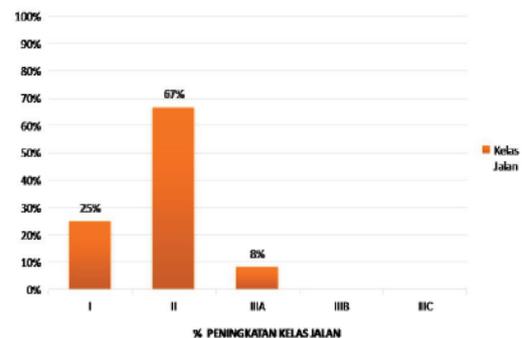
Hasil Tinjauan Terhadap Kelas Jalan

Hasil tinjauan terhadap kelas jalan ditampilkan dalam Tabel 6 dan pada Gambar 4.

Tabel 6. Hasil tinjauan terhadap kelas jalan

No.	Nama Jalan		Koondisi Awal	Rekomendasi
	Ruas	Segmen		
1	Soekarno - Hatta	1	II	Diubah menjadi kelas I
		2		
		3		
2	AMD. Projakal		-	Menjadi kelas II
3	Sultan Hasanudin		-	Menjadi kelas II
4	Mulawarman	1	II	Diubah menjadi kelas I
		2		
		3		
		4		
5	Marsma. R. Iswahyudi	1	III A	Diubah menjadi kelas II
		2		
6	Yos Soedarso		-	Menjadi kelas II
7	Jendral Sudirman	1	-	Menjadi kelas II
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
8	Ahmad Yani		-	Menjadi kelas II
9	Syarifudin Yoes	1	II	Sudah sesuai
		2		
10	MT. Haryono	1	III A	Diubah menjadi kelas II
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
11	Tol/Freeway (Km 13 BPN - TPK. Kariangau)		-	Diubah menjadi jalan Nasional
12	MT. Haryono Dalam		-	Sudah sesuai

HASIL TINJAUAN TERHADAP KELAS JALAN (MST) (PP No. 43 TAHUN 1993)



Gambar 3. Grafik hasil tinjauan terhadap kelas jalan

Hasil Tinjauan Terhadap Hubungan Antar Pusat-pusat Kegiatan

Hasil tinjauan terhadap hubungan antar pusat-pusat kegiatan ditampilkan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Tinjauan terhadap hubungan antar pusat-pusat kegiatan

No.	Nama Jalan	Menghubungkan Antara	Rekomendasi
1	Soekarno - Hatta	PKN dgn PKN	JAP
2	AMD. Projakal	PKN dgn Pelabuhan Pengumpul	JAP
3	Sultan Hasanudin	PKN dgn Pelabuhan Pengumpul	JAP
4	Yos Soedarso	PKN dgn Pelabuhan Utama	JAP
5	Jendral Sudirman	PKL dgn PKN	JAP
6	Marsma. R. Iswahyudi	PKL dgn Bandara Utama	JAP
7	Mulawarman	Bandara Utama dgn PKN	JAP
8	MT. Haryono	PKL dgn PKN	JAP
9	Syaifuldin Yoes	PKL dgn Bandara Utama	JAP
10	Ahmad Yani	PKL dgn Pelabuhan Utama	JAP
11	Tol/Freeway (Km. 13 BPN - TPK. Kariangau)	PKL dgn Pelabuhan Utama	JAP
12	MT. Haryono Dalam	PKL dgn PKN	JKP

KESIMPULAN

Dari penelitian tinjauan jaringan dan fungsi jalan primer berdasarkan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota Balikpapan tahun 2012 – 2032, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. dari 7 ruas jalan primer yakni Jl. Soekarno - Hatta, Jl. AMD. Projakal, Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Mulawarman, Jl. Marsma. R. Iswahyudi, Jl. Yos Soedarso, dan Jl. Jendral Sudirman sudah sesuai dengan fungsinya yakni sebagai Jalan Arteri Primer (JAP).
2. terdapat 2 ruas jalan yang direkomendasikan untuk ditambahkan kedalam RTRW Kota Balikpapan yakni Jl. Tol/Freeway (Km.13 BPN – TPK Kariangau) sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jl. MT. Haryono Dalam sebagai Jalan Kolektor Primer (JKP-4) karena memenuhi persyaratan yang ada didalam peraturan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan pasal 5 ayat 3.

3. terdapat 3 ruas jalan yang sebelumnya berfungsi sebagai Jalan Arteri Sekunder (JAS) yakni Jl. Ahmad Yani, Jl. MT. Haryono, dan Jl. Syarifudin Yoes, berubah menjadi Jalan Arteri Primer (JAP), karena memenuhi persyaratan penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang ada didalam peraturan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan pasal 5 ayat 2, PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pasal 7, dan UU No. 38 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2.
4. dengan adanya perubahan terhadap beberapa fungsi jalan, maka juga akan mengubah status dan penyelenggaraan jalan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perubahan pada status jalan, sebagai berikut:
 - a) Dari 18 segmen jalan yang termasuk dalam jaringan jalan primer pada RTRW Kota Balikpapan 7 segmen jalan dengan status sebagai jalan provinsi, direkomendasikan untuk berubah statusnya menjadi jalan nasional yakni pada Jl. AMD. Projakal, Jl. Sultan Hasanudin, Jl. Mulawarman (Segmen 1, 2, 3, & 4), Jl. Marsma. R. Iswahyudi (Segmen 2).
 - b) Untuk ruas jalan yang ditambahkan yakni Jl. Tol/Freeway (Km.13 BPN - TPK Kariangau) berstatus sebagai jalan Provinsi direkomendasikan untuk ditingkatkan menjadi jalan Nasional dan Jl. MT. Haryono Dalam dengan status sebagai jalan Kota sudah sesuai dengan persyaratan PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 28, UU No. 38 Tahun 2004 pasal 9 ayat 4, dan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 pasal 10 ayat 4.
 - c) Dari 9 segmen jalan sekunder yang direkomendasikan menjadi jalan primer, 5 segmen jalan berstatus sebagai jalan kota dapat direkomendasikan untuk berubah statusnya menjadi jalan nasional yakni Jl. Ahmad Yani, Jl. MT. Haryono (Segmen 3,4,5, & 6).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015. *Statistik Daerah Kota Samarinda Tahun 2015*. Samarinda.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2004. *Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan (Pd-T-18-2004-B)*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1983. *Manual Perkerasan Jalan dengan Alat Benkelman Beam*

- (No.01/MN/BM/83). Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
- Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (Jalan No.038/TBM1997)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*. Jakarta.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Kota Samarinda, 2014. *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034*. Samarinda.
- Pemerintah Kota Samarinda, 2014. *Peta Jaringan Jalan Kota Samarinda*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Samarinda
- Republik Indonesia, 1993. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.
- Sugiarto, Anton. 2015. *Tinjauan Jaringan dan Fungsi Jalan Primer Kota Samarinda Pada RTRW Kota Samarinda Tahun 2014*. Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda.